



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2017 – 2018
Masa Sidang : V
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Senin, 28 Mei 2018
Sifat : Terbuka
Pukul : 13.35 WIB s.d 15.50 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR RI
Acara : Membahas mengenai langkah dan kebijakan Pemerintah terkait permasalahan transportasi umum berbasis aplikasi online
Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 49 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Ketua Organda, dan Operator penyedia layanan aplikasi online beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.35 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Ketua DPP Organda, dan Operator penyedia layanan aplikasi online beserta jajaran terkait lainnya pada hari ini adalah membahas mengenai langkah dan kebijakan Pemerintah terkait permasalahan transportasi umum berbasis aplikasi online.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan, Kakorlantas, dan Ketua DPP Organda untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang telah berupaya menyempurnakan aturan teknis dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi di bidang transportasi, dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan.
2. Komisi V DPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan transportasi daring (dalam jaringan) agar tidak berlarut-larut. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan melakukan pengaturan agar perusahaan aplikasi yang bergerak pada sektor transportasi dapat mematuhi seluruh peraturan di bidang transportasi angkutan sewa khusus.
3. Komisi V DPR RI bersama Pemerintah mewajibkan perusahaan aplikasi yang bergerak di sektor transportasi untuk mentaati dan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang transportasi angkutan sewa khusus.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dan Korlantas POLRI untuk melakukan penegakan hukum termasuk terhadap transportasi daring (dalam jaringan) sesuai peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.35 WIB.

Jakarta, 28 Mei 2018


KETUA RAPAT,


FARY DJEMY FRANCIS

MENTERI PERHUBUNGAN,


BUDI KARYA SUMADI

KAKORLANTAS POLRI,


ROYKE LUMOWA